



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 155 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PAMEUNGPEUK
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Kabupaten Bandung Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 133 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 60);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

- a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
- b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- e. Penutup; dan

- f. Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
- (2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
 - a. Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
 - c. Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

- (1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

- (1) Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
- (2) Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
- (3) Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
- (4) Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

- a. Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
- b. penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
- c. hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
- (3) Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 03 Juli 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 03 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 155

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
BANDUNG
NOMOR 155 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN PAMEUNGPEUK
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PAMEUNGPEUK
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PAMEUNGPEUK
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- : 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
 17. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 133 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas/Badan/Kecamatan ... Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor ...);
 18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II

PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

- a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
- b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;

- e. Penutup; dan
- f. Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
- (2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
 - a. Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
 - c. Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun.

Pasal 5

- (1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

- (1) Semua ketentuan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
- (2) Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
- (3) Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
- (4) Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat

penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

- a. Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
- b. penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
- c. hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
- (3) Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa proses perencanaan Nasional, provinsi maupun kabupaten/kota merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri dari rencana Jangka Panjang, Rencana Jangka Pendek Menengah untuk periode lima tahun yang dituangkan dalam RPJM dan Rencana Jangka Pendek untuk periode 1 tahun yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berpedoman pada undang-undang tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung setiap SKPD diwajibkan untuk membuat Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD dan Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Sebagai sebuah proses yang memungkinkan

adanya perubahan dari segi kebijakan mengikuti perkembangan kondisi terkini baik secara internal maupun eksternal, maka perencanaan perlu bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan dinamika tersebut.

Sesuai amanat tersebut, maka Kecamatan Pameungpeuk sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renja Kecamatan Pameungpeuk tahun 2025. Tahapan Dokumen Renja Tahun 2025 merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun sebagai upaya meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Perubahan Renja Kecamatan Pameungpeuk tahun 2025, merupakan dokumen yang disusun untuk merencanakan pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kabupaten Bandung Tahun 2021–2026, ***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera”***.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, Visi dan Misi Kabupaten Bandung mengalami perubahan yaitu: ***“Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera (BEDAS) , Maju, Dan Berkelanjutan menuju Indonesia Emas”***.

Berdasarkan hasil penelaahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa Kecamatan mempunyai kewajiban untuk mensukseskan Misi Nomor 3 yaitu : ***“Mengoptimalkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel”***.

Berdasarkan hal tersebut Kecamatan Pameungpeuk mencoba akomodatif terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah, murah dan transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, maka Kecamatan Pameungpeuk menyusun Rencana Kerja yang lebih akomodatif dan transparan.

Perubahan Renja Kecamatan Pameungpeuk tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2025 yang telah ditetapkan yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang satu data Indonesia;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889/Tahun 2021 tentang “ Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Bupati Bandung Nomor. 74 Tahun 2019, tentang “Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting”;
9. Peraturan Bupati Bandung tahun 51 Tahun 2021, tentang “Pedoman Pemberian Insentif Guru Ngaji”;
10. Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.467-Tapem/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bandung Nomor137.1/Kep.615.KSOTDA/2019 tentang Pelimpahan Sebagian wewenang Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat;
11. Peraturan Bupati Bandung Nomor: 120 tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
12. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2021-2026 Tanggal 24 Januari 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Perubahan Renja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2025 disusun dengan maksud:

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pagu anggaran, program/kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan,
- b. untuk merencanakan dan memberikan arah strategis sekaligus sebagai acuan resmi bagi seluruh komponen pemerintah dan

masyarakat dalam melaksanakan program prioritas satu tahun ke depan,

- c. menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan di Kecamatan Pameungpeuk pada tahun 2025;

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan Perubahan Renja Kecamatan Pameungpeuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Sebagai pedoman dalam menentukan perencanaan strategis tingkat Kecamatan Pameungpeuk untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- Mengintegrasikan perencanaan tahun 2025 dengan perkembangan yang terjadi;
- Sebagai pedoman/tolok ukur dalam menentukan perencanaan strategis tingkat Kecamatan Pameungpeuk untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya dalam mencapai target tahun 2025;
- Mewujudkan perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung dengan seluruh potensi, kebutuhan dan permasalahan yang ada di Kecamatan Pameungpeuk;
- Dokumen yang disusun dapat dijadikan acuan oleh Kecamatan Pameungpeuk dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2025;

- Dijadikan tolok ukur dalam mengevaluasi capaian kinerja pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
- Dokumen Renja 2025 yang disusun dapat dijadikan acuan oleh Kecamatan Pameungpeuk dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Pasal 343 menyebutkan bahwa Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, adapun sistematika penulisannya adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2025:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Menggambarkan kajian/reviu terhadap hasil evaluasi Renja Kecamatan Pameungpeuk Tahun Lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan;

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD tahun Lalu dan Capaian Renja
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan dan Program Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi telaahan terhadap kebijakan prioritas Pembangunan Nasional, Tujuan dan Sasaran renja dan perumusan program dan kegiatan Kecamatan Pameungpeuk.

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Rencana kerja dan pendanaan di Kecamatan Pameungpeuk.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renja PD

Perubahan Renja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2025 pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Pameungpeuk selama tahun 2023 dan 2024.

Capaian kinerja Kecamatan Pameungpeuk dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja
Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86,50	87,49	101,14
2	Nilai SAKIP	Nilai	71,25	74,05	103,92
3	Persentase BMD/asset dalam keadaan baik	%	91,5	99,25	108,47
4	Persentase Penegakan Perda yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban umum	%	100	100	100
5	Persentase desa dengan administrasi baik	%	100	100	100
		Rata-rata Capaian Kinerja			102,686

Dari Tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja sebagai berikut:

Capaian kinerja secara keseluruhan pada Tahun 2023 sebesar 102,688 % artinya capaian kinerja telah melampaui target yang telah diperjanjikan.

Program dan Kegiatan Tahun 2023 yang menunjang capaian Kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Program dan Kegiatan
Sesuai DPA Perubahan
Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2023
(Sesuai PERMENDAGRI Nomor: 90 Tahun 2019)

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM DAN KEGIATAN		Anggaran berdasarkan Nota Kesepakatan PPAS 2023
Unsur Kewilayahan		
Kecamatan	Rp	5.095.324.923
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	972.407.901
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Rp	65.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	4.440.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		5.140.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		5.140.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.	17.920.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	3.948.486.087
Penyediaan gaji dan tunjangan		3.942.636.087
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Rp	5.850.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	49.524.500
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp.	49.524.500
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	212.851.500
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp.	6.000.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp.	101.060.700
Penyediaan peralatan rumah tangga	Rp.	30.793.800
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	6.431.000
Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan		7.606.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		6.500.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp.	12.000.000

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM DAN KEGIATAN		Anggaran berdasarkan Nota Kesepakatan PPAS 2023
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	42.460.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	57.000.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.	2.000.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp.	55.000.000
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp.	180.280.935
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	32.576.901
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	0
Pengadaan Meubel	Rp.	32.576.901
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	72.900.000
Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Rp.	44.000.000
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp.	8.500.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Rp.	20.400.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.	202.706.000
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum	Rp	42.140.000
Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Rp	42.140.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Rp	148.866.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Rp	148.866.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp	75.000.000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp	1.643.000
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Rp	1.643.000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp	73.357.000
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Rp	36.888.000

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM DAN KEGIATAN		Anggaran berdasarkan Nota Kesepakatan PPAS 2023
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Rp.	36.469.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.	24.780.000
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp.	24.780.000
Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp.	24.780.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp.	125.679.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		125.679.000
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Rp.	39.429.000
Pembinaan Kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional dan nasional	Rp.	45.000.000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan		41.250.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.	48.540.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Rp.	48.540.000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan asset desa		10.770.000
Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Rp.	37.770.000

Dalam pelaksanaan Program dan kegiatan terdapat faktor-faktor penghambat dalam pencapaian target kinerja diantaranya adalah:

- a. Adanya refocusing anggaran yang menyebabkan anggaran program dan kegiatan menjadi tidak mencukupi;
- b. terbatasnya SDM yang kompeten dibidangnya dan jumlahnya masih belum ideal dari kebutuhan yang sebenarnya,
- c. Sarana dan prasarana belum optimal,
- d. Perubahan kebijakan/aturan

Capaian kinerja Kecamatan Pameungpeuk pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja
Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87	90,01	103,459
2	Nilai SAKIP	Nilai	74,05	76,25	102,970
3	Persentase BMD/asset dalam keadaan baik	%	92	95,00	103,260
	Jumlah Desa Cepat Berkembang	%	2	2	100%
Rata-rata Capaian Kinerja					102,422

Dari Tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja sebagai berikut:

Capaian kinerja secara keseluruhan pada Tahun 2024 sebesar 102,422 % artinya capaian kinerja telah melampaui target yang telah diperjanjikan.

Program dan Kegiatan Tahun 2024 yang menunjang capaian Kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan
Sesuai DPA Perubahan
Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2024
(Sesuai PERMENDAGRI Nomor: 90 Tahun 2019)

Program / Kegiatan	Anggaran berdasarkan Nota Kesepakatan PPAS 2024
	Rp
PENDAPATAN	-
Pendapatan Asli Daerah	-
Retribusi Daerah	
BELANJA DAERAH	5.641.745.260

Program / Kegiatan	Anggaran berdasarkan Nota Kesepakatan PPAS 2024
	Rp
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.946.098.370
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.229.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.344.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.420.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.420.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.045.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.031.431.235
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.023.736.235
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.695.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	53.900.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	53.900.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	156.303.416
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.996.900
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.867.311
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.577.080
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.120.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.899.725
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.496.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.160.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.186.400
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	277.581.719
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.847.184
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	205.734.535
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	388.653.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.823.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.430.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	320.400.000

Program / Kegiatan	Anggaran berdasarkan Nota Kesepakatan PPAS 2024
	Rp
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	309.035.065
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	23.400.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23.400.000
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	33.636.000
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	33.636.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	251.999.065
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	251.999.065
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	140.757.000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	140.757.000
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	89.288.000
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	51.469.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	34.514.000
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	34.514.000
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	34.514.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	127.848.825
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	127.848.825
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	48.400.000
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	22.448.825
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	57.000.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	83.492.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	83.492.000

Program / Kegiatan	Anggaran berdasarkan Nota Kesepakatan PPAS 2024
	Rp
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	41.486.000
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	42.006.000

TABEL 2.5
REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN
KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN BANDUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Pada Tahun 2026 (Akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2023			Target Program/Keluaran Renja SKPD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	(7/6)	9	(5+7+9)	(10/4)
0	0	0	KECAMATAN							
1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	75,00	71	71,25	74,05	74,05	
1	2,01	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Tertatanya administrasi pelapor dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	60%
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	6 dok
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	6 dok
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	6 dok
1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan (Lakip, Laptah, Renja, Renstra, Laporan Semester)	10 lap	2 lap	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan
1	2,02	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Tertatnya administrasi pelapor dan keuangan	100%	100%	100%	100%	98,50%	100%
1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji ASN dan Tunjangan ASN	60 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bulan
1	2,02	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen pelaporan Keuangan Akhir (Dok)	5 lap	1 lap	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan
1	2,03	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan Disiplin penunjang aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	
1	2,03	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut	Jumlah Penyediaan pakaian dinas	20 orang	100%	n/a	n/a	100%	n/a
1	2,03	2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Bimtek	5 lap	1 lap	1 lap	1 lap	100%	1 lap

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Pada Tahun 2026 (Akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2022			Target Program/Keluaran Renja SKPD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		
					Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	(7/6)	9	(5+7+9)	(10/4)	
1	2,06	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal	100%	100%	100%	100%	100%		
1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan yang dibeli	5 paket	10 jenis	1 paket	1 paket	100%	1 paket	4 laporan 80
1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 paket	7 jenis	1 paket	1 paket	100%	1 paket	4 laporan 80
1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah alat rumah tangga	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	4 laporan 80
1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik yang dibeli	5 paket	1187 box	1 paket	1 paket	100%	1 paket	4 laporan 80
1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan	5 paket	7 jenis	1 paket	1 paket	100%	1 paket	4 laporan 80
1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan pembayaran bahan bacaan berlangganan	600 dokumen	120 dokumen	120 dokumen	120 dokumen	100%	120 dokumen	360 dokumen 70
1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang terfasilitasi	60 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 laporan 60
1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti dan yang diselenggarakan	60 laporan	108 hok	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 laporan 60
1	2,08	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal	100%	100%	100%	100%	100%		
1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai	5 laporan	200 surat	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	4 laporan 80
1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, dan telepon	60 laporan	12 bulan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	40 laporan 60
1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	65 laporan	12 bulan	13 laporan	13 laporan	100%	13 laporan	40 laporan 60

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Pada Tahun 2026 (Akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2023			Target Program/Keluaran Renja SKPD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan			
					Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2,09	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal	100%	100%	100%	100%	100%			
1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25 Unit	3 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	4 unit	80
1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Penyediaan Jasa Service Perbaikan peralatan kantor dan Pengadaan Suku Cadang	15 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	10 unit	60
1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dokumen rencana Pembangunan Gedung dan halaman Kantor	Dok	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	n/a
1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	4 paket	80
2	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	89,00	86	86,5	85%	100%	87	100%	
2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan									
2	2.02	3	Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan		5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	4 laporan	80
2	2.03	0	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum									
2	2,03	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah peserta sosialisasi	25 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	100%	5 laporan	40 laporan	80
2	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	25 urusan							
2	2,04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan urusan Pemerintahan terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	25 urusan	5 urusan	5 urusan	5 urusan	100	5 urusan	20 urusan	80

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Pada Tahun 2026 (Akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2023			Target Program/Keluaran Renja SKPD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		
					Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
3	2.03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Presentase pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%						
3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								
3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan kegiatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	4 laporan 80
3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan Fasilitasi Pengembangan Usahan Ekonomi Masyarakat	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	4 laporan 80
4	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100%	n/a	100%	100%	100%		
4	2.02	0	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Aparat Keamanan (Linmas) yang Dibina di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	n/a	100%	100%	100%		
4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah aparat keamanan (LINMAS) yang mengikuti sosialisasi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 lap	4 laporan 80
5	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100%	100%	100%	100%	100%		
5	2.01	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	100%		100%	100%	100%	100%	n/a n/a
5	2.01	4	Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,Konsultasi)Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Laporan PHBN	10 lap	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	7 laporan 70
5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku, Intrasuku, Umat Beragama, Ras, Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan nasional	Jumlah Laporan PHBI	10 Laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	7 laporan 70

				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Pada Tahun 2026 (Akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2022			Target Program/Keluaran Renja SKPD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
								Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah laporan pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 lap	4 laporan	80
	6	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	6	2,01	0	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	6	2,01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase program dan kegiatan yang terakomodir melalui Pra Musrebang dan Musrebang tingkat Kecamatan	5 lap	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	4 laporan	80
	6	2,01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah lembaga kemsyarakatan desa yang mendapatkan pembinaan	5 lap	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	4 laporan	80

Pencapaian Tahun Anggaran 2023

Tahun anggaran 2023 Kecamatan Pameungpeuk memiliki anggaran sebesar Rp. 5.095.324.923 yang terdiri dari belanja rutin dan belanja pegawai. Realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 4.894.261.821 atau sebesar 96,05% dari total anggaran.

Pencapaian Tahun Anggaran 2024

Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Pameungpeuk memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 5.641.745.260,- realisasi anggaran tahun 2024 adalah Rp. 5.505.765.567,- atau capaian kinerja sebesar 97,59%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2024

Kecamatan Pameungpeuk sebagai salah satu SKPD yang terdekat dengan masyarakat memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam hal ini kecamatan Pameungpeuk diharapkan mampu menunjukkan eksistensinya sebagai ujung tombak pelayanan publik. Sebagaimana perubahan kedudukan kecamatan dari wilayah administratif pemerintahan menjadi wilayah kerja dari perangkat daerah, maka tugas pokok dan fungsi camat sebagai pimpinan organisasi kecamatan pun berubah dari kepala wilayah, yang memiliki kekuasaan sebagai penguasa tunggal di bidang pemerintahan berubah menjadi perangkat daerah yang bertugas memberikan pelayanan tertentu kepada masyarakat dalam wilayah kerja tertentu.

Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung merupakan salah satu contoh kecamatan yang menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga pelayanan masyarakat. Secara umum, dasar penyelenggaraan

pelayanan publik kecamatan Pameungpeuk adalah Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat sebanyak 356 kewenangan meliputi aspek: Perijinan, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi, Penyelenggaraan, Pengawasan, Penetapan, Pengumpulan data dan informasi.

Maksud dilimpahkannya sebagian wewenang Bupati kepada Camat adalah untuk mempertegas dan memberi kepastian hukum bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat sebagai Perangkat Daerah. Adapun tujuan dilimpahkannya sebagian wewenang Bupati kepada Camat adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Camat.

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023, yang mencapai 100%. meskipun terdapat beberapa program/kegiatan yang dihapus karena adanya refocusing anggaran akan tetapi seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dan kinerja pelayanan Kecamatan Pameungpeuk dapat dikatakan baik, namun demikian masih terdapat beberapa kegiatan yang belum berjalan optimal. Hal tersebut disebabkan oleh :

1. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur kecamatan, sehingga pelaksanaan tugas belum dapat dilaksanakan secara optimal.
2. Masih terdapatnya pelaksanaan tugas pokok yang belum didukung dengan anggaran yang memadai.
3. Belum optimalnya ketersediaan data sebagai bahan pembuat kebijakan, program dan kegiatan.

4. Adanya refocusing anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan kurang optimal;

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Pameungpeuk, maka peningkatan kinerja organisasi melalui perencanaan kegiatan tahunan secara sistematis dan terstruktur, menjadi hal yang mutlak dilakukan pada tahun-tahun yang akan datang. Adapun Analisis Kinerja Pelayanan SKPD dapat dilihat pada tabel 2.6

TABEL 2.6
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PAMEUNGPEUK
KABUPATEN BANDUNG

No	Indikator	SPM/Sta ndar Nasional	IK K	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CAT.
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023(%)	Tahun 2024	Tahun 2025	
	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah			2 laporan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dok	2 dokumen	2 dokumen	
	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA SKPD			-	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
	Jumlah dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA SKPD			-	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
	Jumlah dokumen pelaporan (Lakip, Laptah, Renja, Renstra, Laporan Semeter)			2 dokumen	2 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	
	Prosentase Tertatnya administrasi pelapor dan keuangan			100%	100%	100%	100%	100%	n/a	100%	100%	
	Jumlah Pembayaran Gaji ASN dan Tunjangan ASN			18 orang	18 orang	20 orang	18 orang	18 orang	18 orang	20 orang	20 orang	
	Dokumen pelaporan Keuangan Akhir (Dok)			2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	n//a	2 laporan	2 laporan	
	Prosentase pemenuhan Disiplin penunjang aparatur			100%	100%	100%	100%	100%	n/a	100%	100%	
	Jumlah Penyediaan pakaian dinas			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Jumlah Kegiatan Birtek			20 orang	50 orang	50 orang	n/a	n/a	50 orang	n/a	n/a	
	Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal			100%	100%	100%	100%	100%	n/a	100%	100%	
	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan yang dibeli			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	n/a	1 paket	1 paket	
	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli			1 paket	1 paket	4 paket	4 paket	4 paket	1 paket	1 paket	1 paket	
	jumlah alat rumah tangga			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	n/a	1 paket	1 paket	
	jumlah bahan logistik yang dibeli			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	n/a	1 paket	1 paket	
	Jumlah penyediaan bahan cetakan dan penggandaan			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	n/a	1 paket	1 paket	
	Jumlah bulan pembayaran bahan bacaan berlangganan			120 dok	120 dok	12 dok	12 dok	12 dok	n/a	12 dok	12 dok	
	Jumlah Kunjungan Tamu yang terfasilitasi			12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	n/a	12 laporan	12 laporan	
	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti dan yang diselenggarakan			12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	n/a	12 laporan	12 laporan	

Perubahan Renja Pameungpeuk Tahun 2025

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CAT.
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023(%)	Tahun 2024	Tahun 2025	
	Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal			100%	100%	100%	100%	100%	n/a	100%	100%	
	Jumlah Penyediaan Materi			12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	n/a	12 laporan	12 laporan	
	Jumlah penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, dan telepon			12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	1 lap	12 laporan	12 laporan	
	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			13 laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan	1 lap	13 laporan	13 laporan	
	Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal			100%	100%	100%	100%	100%	n/a	100%	100%	
	Jumlah Pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	13 unit	n/a	7 unit	7 unit	
	Jumlah Penyediaan Jasa Service Perbaikan peralatan kantor dan Pengadaan Suku Cadang			3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 jenis	n/a	3 unit	3 unit	
	Dokumen rencana Pembangunan Gedung dan halaman Kantor			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 dok	n/a	n/a	
	Jumlah pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor			1unit	1unit	1unit	1unit	1 paket	n/a	1unit	1unit	
	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT											
	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	n/a	1 laporan	1 laporan	
	Jumlah laporan Peningkatan efektivitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			1 laporan	12 laporan							
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan											
	Jumlah laporan kegiatan Peningkatan efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan			1 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	1 laporan	n/a	12 laporan	12 laporan	
	Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum											
	Jumlah dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			1 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	1 laporan	n/a	3 laporan	3 laporan	
	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											
	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan			5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	n/a	5 laporan	5 laporan	
	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa											
	Jumlah laporan Peningkatan Efektivitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan			0	1 laporan	1 laporan	1 laporan	n/a	1 laporan	1 laporan	1 laporan	

Perubahan Renja Pameungpeuk Tahun 2025

No	Indikator	SPM/Sta ndar Nasional	IK K	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		cat
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023(%)	Tahun 2024	Tahun 2025	
	Prosentase pembinaan lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi			0	3 lembaga	3 lembaga	3 lembaga	n/a	3 lembaga	3 lembaga	3 lembaga	
	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan			n/a	3 lembaga	3 lembaga	3 lembaga	n/a	3 lembaga	3 lembaga	3 lembaga	
	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			n/a	1 laporan	1 laporan	1 laporan	n/a	n/a	1 laporan	1 laporan	
	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum											
	Jumlah laporan kegiatan Sinergitas dengan kepolisian Negara RI, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan			n/a	12 laporan	12 laporan	12 laporan	n/a	n/a	12 laporan	12 laporan	
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan											
	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional			0	300 orang	600 orang	n/a	n/a	n/a	600 orang	600 orang	
	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.			3 laporan	100 orang	100 orang	100 orang	3 laporan	n/a	100 orang	100 orang	
	Jumlah dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	n/a	12 laporan	12 laporan	
	Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			100%	100%	100%	100%	100%	n/a	100%	100%	
	Jumlah laporan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset desa			n/a	6 dok	6 dok	6 dok	n/a	n/a	6 dok	6 dok	
	Jumlah dokumen sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			1 laporan	100%	100%	100%	100%	n/a	100%	100%	

2.3. Isu - isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung merupakan salah satu kecamatan yang telah menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga pelayanan masyarakat. Secara umum dasar pelayanan publik Kecamatan Pameungpeuk adalah Peraturan Bupati nomor 60 Tahun 2011 tentang pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat sebanyak 356 kewenangan yang meliputi aspek: perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penyelenggaraan, pengawasan, penetapan, pengumpulan data dan informasi.

Identifikasi permasalahan didapat pada pelayanan publik dengan standar prima dan profesionalisme aparatur pemerintah serta pengembangan antusiasme masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan di Kecamatan Pameungpeuk. Permasalahan yang terjadi diantaranya adalah: Masyarakat belum terlayani secara optimal, SDM masih kurang, Disiplin Aparatur masih rendah, tingkat keamanan dan ketertiban masih kurang, sarana dan prasarana masih kurang memadai, belum optimal perencanaan tingkat OPD, kurangnya tingkat pemahaman aparatur terhadap pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat, belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP), dan SPIP belum berjalan dengan baik.

2.3.1. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Permasalahan dan hambatan yang ada terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala daerah sangat berpengaruh meskipun

permasalahan dan hambatan tersebut bisa diatasi dengan melakukan monitoring dan evaluasi intern secara berkala sehingga program dan kegiatan berjalan dengan lancar.

Hasil dari identifikasi permasalahan di Kecamatan Pameungpeuk terkait faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan menjadi masukan bagi perumusan strategi pelayanan di Kecamatan Pameungpeuk. Dengan demikian isu-isu strategis yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor penghambat dan pendorong agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berbagai isu global dan nasional perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Isu yang dihadapi oleh Kabupaten Bandung antara lain:

1. Belum optimalnya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kemampuan berdaya saing;
2. Belum optimalnya penerapan prinsip good governance dalam tatakelola pemerintahan;
3. Belum terwujudnya perekonomian yang inklusif dan berdaya saing;
4. Belum meratanya pembangunan wilayah dalam mendukung keberlanjutan ketahanan pangan;

5. Belum tercapainya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang berkelanjutan dalam mendukung pembangunan wilayah;
6. Belum meratanya pembangunan infrastruktur wilayah yang kokoh dan berketahanan dalam menghadapi tantangan dan dinamika pembangunan.

Dalam menangani isu tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh komponen masyarakat dan penyelenggara pemerintah. Dengan mempertimbangkan isu yang ada, maka visi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yang dituangkan dalam RPJMD tahun 2021-2026 yang hendak dicapai adalah

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera”.

Memperhatikan visi tersebut di atas serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Bandung dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Dengan memperhatikan isu dan pencapaian visi Kabupaten Bandung tersebut, maka dirumuskan 5 (lima) misi Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Membangkitkan Daya Saing Daerah
2. Menyediakan Layanan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas dan merata
3. Mengoptimalkan Pembangunan Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat yang menjunjung tinggi Kreativitas dalam Bingkai Kearifan lokal dan berbasis lingkungan.

4. Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Birokrasi yang profesional dan Tata Kehidupan Masyarakat yang Berlandaskan Nilai-nilai Keagamaan.
5. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Prinsip Keadilan dan Keberpihakan pada kelompok Masyarakat Lemah

Sebagai salah satu Perangkat Daerah, maka Kecamatan Pameungpeuk berusaha untuk turut serta mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang kemudian menjadi visi dan misi Kecamatan Pameungpeuk sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan modal semangat dan kerjasama selama pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dilaksanakan meskipun belum optimal.

2.3.2. Tantangan dan Peluang

2.3.2.1. Tantangan

Pelaksanaan program dan kegiatan tidak terlepas dari adanya tantangan baik dari dalam maupun dari luar instansi, adapun tantangan tersebut diantaranya:

Tantangan dari dalam meliputi:

- Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat
- Pemahaman pegawai terhadap teknologi informasi masih rendah,
- Pemeliharaan asset Kecamatan belum tertata dengan baik.
- Pemahaman aparatur terhadap tupoksi masih kurang,
- Pembinaan aparatur dalam meningkatkan kinerja masih kurang.
- Sinergitas dan kerjasama antar unit kerja masih belum optimal

Tantangan dari luar meliputi:

- Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan.

- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan sistem keamanan lingkungan, kebersihan/lingkungan sehat,
- Rendahnya pemberdayaan lembaga di tingkat desa

2.3.2.2. Peluang

Peluang dalam menghadapi tantangan dan hambatan diantaranya adalah:

- Tersedianya dukungan anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan
- Dukungan dari aparatur PNS dan Non PNS
- Sarana dan Prasarana yang tersedia,
- Kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan,
- Kinerja Aparatur Kecamatan yang terus meningkat
- Peningkatan dan pelatihan di bidang Teknologi dan informasi bagi Aparatur
- Peningkatan pembinaan dan fasilitasi ke desa-desa secara berkala.

2.3.4. Formulasi Isu-isu Penting

Tindak lanjut dari permasalahan, tantangan dan peluang merupakan suatu rangkaian tindakan untuk menentukan perencanaan strategis dalam melaksanakan suatu program dan kegiatan. Formulasi di maksud diantaranya adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia melalui pendidikan formal maupun non formal dan penataan ruang pelayanan, perbaikan sistem pelayanan yang telah ada
- 2) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan mulai di Tingkat Desa dan Kecamatan dengan lebih melibatkan seluruh komponen masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan

peran serta dan swadaya masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan.

- 3) Diupayakan dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara Rutin, *Continue* dan berkesinambungan disamping mengupayakan program *reward*.
- 4) Menyelenggarakan pelatihan Manajemen pengelolaan lembaga perekonomian masyarakat, pengajuan bantuan modal usaha bagi UKM.
- 5) Menyelenggarakan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya arti kesetia kawanan sosial.
- 6) Membudayakan kembali siskamling dan pelatihan bagi anggota Linmas agar kemampuannya meningkat.
- 7) Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat tentang kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat untuk menekan angka stunting di desa wilayah Kecamatan Pameungpeuk.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

a. Perbandingan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dilaksanakan agar penyusunan rencana kerja tahun yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan. Tim penyusun renja di tingkat Kecamatan melakukan inventarisasi kebutuhan berdasarkan permasalahan yang ada yang menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kecamatan. Tim Renja melakukan koordinasi untuk merumuskan perencanaan tahun berikutnya dengan acuan rancangan RKPD dan melakukan penelaahan terhadap permasalahan yang ada dan merupakan prioritas untuk dilaksanakan.

b. Alasan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan dilakukan agar setiap perencanaan sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Rancangan awal RKPD tahun 2025 yang terdiri dari rancangan awal Rencana Kerja SKPD termasuk Kecamatan Pameungpeuk disusun sebelum pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan. Dalam perkembangannya rancangan awal tersebut mengalami beberapa perubahan disesuaikan dengan kebutuhan. Perubahan dimaksud dapat digambarkan dalam tabel 2.5. berikut ini :

TABEL 2.5
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN BANDUNG

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan .Pameungpeuk	Nilai SAKIP Kecamatan Pameungpeuk	76,80	4.226.484.935	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan .Pameungpeuk	Nilai SAKIP Kecamatan Pameungpeuk	76,80	5.086.026.270,00	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Kecamatan .Pameungpeuk	Prosentase Tertatanya Administrasi Pelaporan dan Keuangan	100%	15.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Kecamatan .Pameungpeuk	Prosentase Tertatanya Administrasi Pelaporan dan Keuangan	100%	35.009.200,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan .Pameungpeuk	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	2.440.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan .Pameungpeuk	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	4.048.200,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan .Pameungpeuk	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 dok	4.700.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan .Pameungpeuk	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 dok	5.005.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan .Pameungpeuk	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	2 dok	4.700.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan .Pameungpeuk	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	2 dok	6.535.000,00	
	Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan .Pameungpeuk	Jumlah dokumen pelaporan (LKIP, Laptah, Renja, Renstra, Laporan Triwulan, DPA, RKA)	8 lap	3.160.000	Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan .Pameungpeuk	Jumlah dokumen pelaporan (LKIP, Laptah, Renja, Renstra, Laporan Triwulan, DPA, RKA)	8 lap	15.821.000,00	
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan .Pameungpeuk	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 lap	100.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan .Pameungpeuk	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 lap	1.800.000	
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan .Pameungpeuk	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 lap	100.000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan .Pameungpeuk	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 lap	1.800.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan .Pameungpeuk	Prosentase tertatanya administrasi keuangan dan laporan keuangan	100%	3.815.300.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan .Pameungpeuk	Prosentase tertatanya administrasi keuangan dan laporan keuangan	100%	4.488.030,100,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan .Pameungpeuk	Jumlah pembayaran Gaji ASN	12 bln	3.803.300.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan .Pameungpeuk	Jumlah pembayaran Gaji ASN	21 orang	4.484.030,100,00	
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kecamatan .Pameungpeuk	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	1 dok	12.000.000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kecamatan .Pameungpeuk	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	2 lap	3.984.200,00	

Perubahan Renja Pameungpeuk Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan .Pameungpeuk	Prosentase pemenuhan disiplin penunjang aparatur	100%	12.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Pameungpeuk	Prosentase pemenuhan disiplin penunjang aparatur	100%	30.377.800,00	
	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah penyediaan pakaian dinas	40 stel	n/a	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah penyediaan pakaian dinas	1 paket	9.194.000,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan		5.975.500	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	1 laporan	2.420.000,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Pameungpeuk	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	n/a	6.024.500	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Pameungpeuk	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	n/a	18.763.500,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Pameungpeuk	Prosentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum yang maksimal	100%	91.936.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Pameungpeuk	Prosentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum yang maksimal	100%	137.640.255,00	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik	10 jenis	6.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik	1 paket	5.998.800,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	33 jenis	14.615.600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	46.832.655,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	10 jenis	10.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	1 paket	38.177.900,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah Penyediaan Minuman Pegawai	1 jenis	6.431.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah Penyediaan Minuman Pegawai	1 paket	9.154.300,00	
	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	10 jenis	10.000.000	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	1 paket	10.000.000,00	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	6.500.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	120 dok	5.501.500,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	184 ok	12.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 lap	12.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	176 ok	26.390.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12 lap	9.975.000,00	
	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Pameungpeuk	Prosentase asset/Barang dalam keadaan baik	*91,5%	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Pameungpeuk	Prosentase asset/Barang dalam keadaan baik	*91,5%	24.654.200,00	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah kendaraan dinas jabatan	Unit	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah kendaraan dinas jabatan	unit	0	

Perubahan Renja Pameungpeuk Tahun 2025

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Mebel	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	n/a	n/a	Pengadaan Mebel	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 unit	22.054.200,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	n/a	n/a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	2.800.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pameungpeuk	Nilai SAKIP Kecamatan Pameungpeuk	71,8	195.280.935	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pameungpeuk	Nilai SAKIP Kecamatan Pameungpeuk	76,80	257.292.216,00	
	Penyediaan Jasa surat menyurat	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah penyediaan materai	1 jenis	2.000.000	Penyediaan Jasa surat menyurat	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah penyediaan materai	12 lap	2.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih dan telepon	12 bln	31.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih dan telepon	1 lap	35.348.135,00	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	4 orang	162.280.935	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	13 lap	219.944.080,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Pameungpeuk	Prosentase asset/Barang dalam keadaan baik	91%	62.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Pameungpeuk	Prosentase asset/Barang dalam keadaan baik	91%	93.022.500,00	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	n/a	n/a	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	n/a	-	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	5 unit	44.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	7 unit	63.966.500,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah penyediaan jasa service perbaikan peralatan kantor dan pengadaan suku cadang	3 jenis	8.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah penyediaan jasa service perbaikan peralatan kantor dan pengadaan suku cadang	3 unit	8.330.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Kecamatan Pameungpeuk	Dokumen rencana pembangunan gedung dan halaman kantor	Dok	2.962.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Kecamatan Pameungpeuk	Dokumen rencana pembangunan gedung dan halaman kantor	1 dok	20.706.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	1 jenis	7.038.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	1 unit	-	
	Jumlah				4.226.484.935	Jumlah				5.086.026.270,00	

Perubahan Renja Pameungpeuk Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Pameungpeuk	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	85.321.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Pameungpeuk	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	248.588.655,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Kecamatan Pameungpeuk	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100%	11.700.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Kecamatan Pameungpeuk	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100%	73.400.000,00	
	Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah laporan Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	12 lap	11.700.000	Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah laporan Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	12 lap	73.400.000,00	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan Pameungpeuk	Persentase capaian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	100%	37.240.000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan Pameungpeuk	Persentase capaian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	100%	11.445.300,00	
	Koordinasi/Sinergi dengan perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Pelayanan Umum	1 keg	37.240.000	Koordinasi/Sinergi dengan perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah dokumen koordinasi/Sinergi dengan perangkat Daerah	12 dok	11.445.300,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Pameungpeuk	Prosentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	24.141.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Pameungpeuk	Prosentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	163.743.355,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	5 laporann	24.141.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	5 lap	163.743.355,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Pameungpeuk			38.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Pameungpeuk			93.267.400,00	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Pameungpeuk	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		1.643.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Pameungpeuk	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		93.267.400,00	
	Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah laporan Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan		1.643.000	Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah laporan Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1 lap		

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urutan Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan oleh kecamatan bagi pemerintah kota yang tidak memiliki desa)	Kecamatan Pameungpeuk	Prosentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	36.357.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urutan Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan oleh kecamatan bagi pemerintah kota yang tidak memiliki desa)	Kecamatan Pameungpeuk	Prosentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	53.226.500,00	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	3 lap	24.888.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	3 lembaga	30.230.300,00	
						Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 laporan	9.810.600,00	
						Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	53.228.500,00	
						Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	50 keluarga	11.445.300,00	
						Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat		Jumlah keluarga yang mengikuti Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	50 keluarga	9.445.300,00	
						Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya		Jumlah keluarga yang mengikuti Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	50 keluarga	11.445.300,00	
						Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		Jumlah keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50 keluarga	11.445.300,00	
						Pelatihan keluarga Tanggap bencana rumah tangga		Jumlah keluarga Pelatihan keluarga Tanggap bencana rumah tangga	50 keluarga	9.445.300,00	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pameungpeuk	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum		12.094.300	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pameungpeuk	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum		19.930.300,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Harmonisasi Hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kecamatan Pameungpeuk	Harmonisasi Hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	1 lap	2.534.000	Harmonisasi Hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kecamatan Pameungpeuk	Harmonisasi Hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	0	0	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Pameungpeuk	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	4.780.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Pameungpeuk	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	19.930.300,00	
	Koordinasi/sinergitas dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah laporan Koordinasi/sinergitas dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 lap	4.780.000	Koordinasi/sinergitas dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah laporan Koordinasi/sinergitas dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 lap	19.930.300,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Pameungpeuk	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	62.679.000	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Pameungpeuk	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	111.238.468,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Pameungpeuk	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	62.679.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Pameungpeuk	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	111.238.468,00	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Pameungpeuk	jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan	2 keg	39.429.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945	300 orang		
	Fasilitasi Koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	n/a	n/a	Fasilitasi Koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	300 orang	55.565.068,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Pameungpeuk	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	2 keg	20.000.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	50 orang	18.173.400,00	
	Pelaksanaan tugas forum koordinasi Pimpinan Kecamatan	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah laporan Pelaksanaan tugas forum koordinasi Pimpinan Kecamatan	12 lap	3.250.000	Pelaksanaan tugas forum koordinasi Pimpinan Kecamatan	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah dokumen Pelaksanaan tugas forum koordinasi Pimpinan Kecamatan	12 dok	37.500.000,00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Pameungpeuk	Prosentase desa dengan administrasi baik	100	41.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Prosentase desa dengan administrasi baik	100%	38.095.300,00	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Pameungpeuk	Persentase pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	41.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Pameungpeuk	Persentase pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	38.095.300,00	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah laporan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	laporan	1.300.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah laporan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	laporan	n/a	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset desa	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah laporan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset desa		1.300.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset desa	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah laporan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset desa	6 dok	6.500.000,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah laporan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 lap	630.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah lapran Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 lap	37.770.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Pameungpeuk	Jumlah lapran Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 lap	31.595.300,00	
	Jumlah 2				239.094.000,00					491.122.123,00	
	Jumlah Total (1+2)				4.465.578.935,00					5.577.148.393,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan Pameungpeuk akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan yang langsung ditujukan kepada Kecamatan Pameungpeuk, hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan selama hal tersebut sesuai dengan rencana strategis Kecamatan Pameungpeuk.

Musrenbang Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan melibatkan seluruh perwakilan dari desa dan pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan, dan usulan tersebut terbagi dalam bidang Sosial, Budaya, Ekonomi dan Infrastruktur. Hasil Musrenbang tersebut didokumentasikan oleh Tim Musrenbang Kecamatan untuk diusulkan pada Musrenbang tingkat Kabupaten.

Tingkat Kesesuaian usulan dari Desa yang diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan, secara keseluruhan sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan Tupoksi Perangkat Daerah, namun demikian dibatasi kuota pagu anggaran Kecamatan usulan tersebut tidak terakomodir secara keseluruhan. Daftar skala prioritas untuk desa-desa disetujui masuk dalam RKP OPD/Dinas terkait dan RKPD Kab. Bandung, adapun usulan program/kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kecamatan Pameungpeuk

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
		NIHIL			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Perubahan Renja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2025 disusun berdasarkan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tahun 2025 yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung selain itu berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2021-2026, dimana Renstra Kecamatan Pameungpeuk tersebut merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026. Adapun RPJMD Kabupaten Bandung tersebut disusun melalui kajian dan penelaahan terhadap RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Barat, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Kecamatan Pameungpeuk bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, seperti RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2026 serta RKPD Kabupaten Bandung 2025.

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi PD kecamatan sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, Dari beberapa sasaran strategis yang ditetapkan, memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian kinerja pelayanan PD Kecamatan yang antara lain:

1. Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah Dan Desa
 - A. Sasaran Program 1 Meningkatnya Tertib Administrasi Kewilayahan, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dan Terpadu, Kinerja Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, serta Pengelolaan Kawasan dan Perbatasan Negara
Indikator : Persentase jumlah kecamatan dengan indeks kinerja kategori "Baik"
 - B. Meningkatnya kinerja GWPP, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dan terpadu

Indikator : Jumlah Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan di kecamatan yang efektif

Untuk Renstra Provinsi yang terkait langsung dengan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan adalah Renstra Setda Provinsi Jawa Barat dengan sasaran :

1. Meningkatnya Efektifitas Tata kelola pemerintahan Daerah Bidang Administrasi

Indikator : Nilai peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Berdasarkan hasil analisis terhadap RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 maka Renstra Kecamatan Pameungpeuk 2021-2026 telah menyusun faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang ada. Berdasarkan analisis Renstra terhadap penanganan masalah maka dalam menyusun Perubahan Renja 2025 diperlukan strategi dalam menghadapi permasalahan tersebut dengan efektif.

Berdasarkan hal tersebut diperoleh *critical succes faktor* yang merupakan strategi fungsi yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan motivasi pegawai yang memadai;
2. Peningkatan kesejahteraan aparatur;
3. Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah;
4. Koordinasi yang mantap antar lini/sektor/unit.
5. Peran serta aktif dari masyarakat dan swasta yang mendukung program dan kegiatan.
6. Tersedianya sarana prasarana yang memadai.
7. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi;
8. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan informasi
9. Tersedianya alokasi anggaran yang cukup guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.
10. Komitmen kuat dari pihak eksekutif dan legislatif melalui kebijakan yang ada untuk menguatkan peran kecamatan.

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Bandung dalam rangka memberikan kontribusi terhadap standar penyelenggaraan good

governance dan akuntabilitas publik pada penyelenggaraan pemerintah baik pusat maupun daerah. Peranan kecamatan sangat strategis dalam menerapkan kebijakan dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan fungsi sebagai berikut:

- a. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan, pembinaan terhadap pemerintahan desa dan melaksanakan pelayanan masyarakat tingkat kecamatan.
- b. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penyelenggaraan dan kewenangan yang dilimpahkan.

Dukungan Program Perangkat Daerah (Kecamatan) yang mendukung terhadap prioritas pembangunan Kabupaten dan prioritas Nasional

Prioritas Nasional	Program Provinsi Jawa Barat	Program Kabupaten Bandung	Program Kecamatan Pameungpeuk
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan publik	Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif.	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah daerah dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik
Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang memenuhi standar dan berkeadilan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tataruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan ruang.	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Memperkuat stabilitas polhukanham dan transformasi pelayanan publik	Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan resiko bencana	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi resiko perubahan iklim	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Strategi dan kebijakan yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 serta prioritas pembangunan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Strategi Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 yaitu melakukan evaluasi kinerja aparatur pemerintah dan memberlakukan sistem reward and punishment.
2. Kebijakan pada RPJMD 2021-2026 yaitu peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan penilaian terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah,
3. Prioritas pembangunan tahun 2025 yaitu reformasi birokrasi

Dalam rangka mewujudkan Misi dan Visi Kabupaten Bandung, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Perubahan Renja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2025, yaitu:

1. Meningkatnya kapasitas, peran dan fungsi Kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat serta berlandaskan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik;
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan desa;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan terpeliharanya infrastruktur pelayanan umum dalam mendukung penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk

dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Terselenggaranya pelayanan publik yang semakin prima;
2. Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana kantor yang memadai;
3. Meningkatnya kualitas SDM aparatur dalam mendukung pelaksanaan pelayanan publik;
4. Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
5. Meningkatnya sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan;
6. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pemerintahan;
7. Meningkatnya kualitas pemeliharaan sarana pelayanan umum;

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Pameungpeuk berdasarkan Renstra Perubahan 2021-2026 mengalami perubahan pada Tujuan menurunnya Gangguan Keamanan dan Ketertiban masyarakat di hapus dikarenakan tujuan tersebut merupakan bagian dari tugas Kepolisian setempat. Dan indikator persentase desa dengan administrasi baik dirubah menjadi jumlah desa cepat berkembang. Selain itu Nilai SAKIP Tahun 2024 dirubah dari 71,50 menjadi 74,05 dan seterusnya untuk tahun berikutnya, hal ini disebabkan karena pada tahun 2024 perolehan Nilai Sakip melampaui target yang ditentukan sebelumnya. Berikut ini tabel perubahan Tujuan, sasaran dan indikator berdasarkan Renstra Perubahan 2021-2026.

Tabel 3.1
Tabel Perubahan
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pameungpeuk

No.	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR		TARGET KINERJA RENSTRA 2021-2026								Perangkat Daerah
							Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target					Kondisi Akhir Renstra	
									2022	2023	2024	2025	2026		
Sebelum Reviu	Sesudah Reviu	Sebelum Reviu	Sesudah Reviu	Sebelum Reviu	Sesudah Reviu										
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kecamatan Pameungpeuk	Meningkatkan Akuntabilitas Kecamatan Pameungpeuk	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan public	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	Nilai	66	71	71.25	74.05	76,50	77	77	Kec. Pameungpeuk
					Persentase BMD dalam kondisi baik	Persentase BMD dalam kondisi baik									
2	Meningkatkan Kualitas pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai IKM	Nilai IKM	Nilai	85	86	86,5	87	91	92	92	
3	Menurunnya Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perundang-undangan	-	Persentase Penegakan perda yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban umum	-	%	0	100	100	0	0	0	0	
4	Meningkatkan kualitas pemerintahan desa	Meningkatkan kualitas pemerintahan desa	Meningkatnya pengelolaan Pemerintahan Desa	Meningkatnya pengelolaan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan administrasi baik	Persentase Desa dengan administrasi baik	%	0	100	100	0	0	0	0	
	Meningkatkan kualitas pemerintahan desa	Meningkatkan kualitas pemerintahan desa	Meningkatnya pengelolaan Pemerintahan Desa	Meningkatnya pengelolaan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan administrasi baik	Jumlah Desa Cepat Berkembang	Nilai	0	0	0	2	2	2	6	

Catatan : Tahun 2024 target nilai SAKIP berubah dari 71,50 menjadi 74,05
Sedangkan tahun 2025 target berubah menjadi 76,50, Tahun 2026 menjadi 77
Target IKM Tahun 2025 terdapat penyesuaian menjadi 91 dan Tahun 2026 menjadi 92

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pameungpeuk

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kecamatan Pameungpeuk	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP			
1.1	Meningkatkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu		
1.1.1	Tersedianya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Perencanaan Perangkat Daerah	
1.1.2	Tersedianya Dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
1.1.3	Tersedianya Dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
1.1.4	Tersedianya dokumen Capaian Kinerja dan laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen Capaian Kinerja dan laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
1.2	Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu		
1.2.1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN tepat waktu	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1.2.2	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SPPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SPPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SPPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
1.3	Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu		
1.3.1	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersusunnya laporan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
1.4	Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor		
1.4.1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Tersusunnya laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
1.4.2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersusunnya laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
1.4.3	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Tersusunnya laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
1.4.4	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Tersusunnya laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
1.4.5	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Tersusunnya laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
1.4.6	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersusunnya laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	
1.4.7	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersusunnya laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1.4.8	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersusunnya laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
1.5	Meningkatkan Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1.5.1	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Tersusunnya laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
1.5.2	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersusunnya laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
1.5.3	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersusunnya laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
1.6.	Meningkatkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD dalam Kondisi Baik		
1.6.1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Tersusunnya laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
1.6.2	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersusunnya laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
1.6.3	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Tersusunnya laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Pameungpeuk	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Pameungpeuk	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat			

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
2.1	Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan		
2.1.1	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersusunnya laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
2.2	Meningkatkan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Meningkatnya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		
2.2.1	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Tersusunnya laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
2.3	Meningkatkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan		
2.3.1	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Tersusunan laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
2.4	Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urutan Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan oleh kecamatan bagi pemerintah kota yang tidak memiliki desa)	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urutan Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan oleh kecamatan bagi pemerintah kota yang tidak memiliki desa)	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urutan Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan oleh kecamatan bagi pemerintah kota yang tidak memiliki desa)	Indeks Kepuasan Masyarakat			

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
2.4.1	Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa		
2.4.1.1	Terlaksananya Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersusunnya laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
2.5	Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi		
2.5.1	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Tersedianya laporan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
2.5.2	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	tersedianya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Tersedianya kegiatan ketahanan pangan keluarga Tingkat kecamatan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			Jumlah laporan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terselenggaranya kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dan Kesehatan keluarga dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			Jumah laporan kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Meningkatnya kesadaran keluarga dalam meningkatkan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			Jumlah laporan kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pemahaman Masyarakat terhadap keluarga tanggap bencana alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			Jumlah laporan kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Terselenggaranya pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga			Jumlah laporan kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
3	Menurunnya Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perundang-undangan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum			
3.1	Meningkatkan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
3.1.1	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Tersusunnya laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Pameungpeuk	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Pameungpeuk	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indek Kepuasan Masyarakat			
4.1	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
4.1.1	Terlaksananya Fasilitasi , Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Tersusunnya laporan Fasilitasi , Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi , Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi , Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
4.1.2	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan intrasuku, Umat Beragama, Ras, Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Tersusunnya laporan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan intrasuku, Umat Beragama, Ras, Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan intrasuku, Umat Beragama, Ras, Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
4.1.3	Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Tersusunnya laporan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
5	Meningkatkan kualitas pemerintahan desa	Meningkatnya pengelolaan Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah desa cepat berkembang			
5.1	Meningkatkan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa		Prosentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi, Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		
5.1.1	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tersedianya laporan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Jumlah laporan kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa	
5.1.2	Terlaksananya Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Tersedianya laporan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Jumlah laporan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	

3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung, yang di tuangkan dalam RPJMD tahun 2021-2026, yang hendak dicapai adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang *Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera*”.

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Bandung dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah, maka Kecamatan Pameungpeuk berusaha untuk turut serta mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi Bupati dan wakil Bupati terpilih yang kemudian menjadi visi dan misi pemerintah Kabupaten Bandung sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut peraturan perundangan yang berlaku. Dengan modal semangat dan kerjasama selama ini pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dilaksanakan meskipun dengan hasil yang belum optimal.

Berdasarkan hasil penelaahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa Kecamatan akan menyelesaikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Misi ke 4 yaitu: *“Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan melalui birokrasi yang profesional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan.*

Berdasarkan Misi dan isu-isu strategis Pemerintah Daerah diharapkan Kecamatan Pameungpeuk dapat berperan lebih aktif dalam

menghadapi segala perubahan yang terjadi. Dalam melaksanakan tindak lanjut dalam menghadapi perubahan tersebut, maka Kecamatan Pameungpeuk berperan aktif dengan merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri 90/2019 dan hasil pemutakhiran Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan belanja yang direncanakan tahun 2025 terdiri dari :

Tabel 3.3
PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN PAMEUNGPEUK
TAHUN 2025
(Sesuai PERMENDAGRI Nomor: 90 Tahun 2019)

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN Berdasarkan Nota Kesepakatan PPAS 2025
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.066.026.270,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.009.200,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.048.200,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.005.000,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.535.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.821.000,00
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1.800.000,00
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	1.800.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.488.030.100,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.484.045.900,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.984.200,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.377.800,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.194.000,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.420.300,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18.763.500,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	137.640.255,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.988.900,00

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN Berdasarkan Nota Kesepakatan PPAS 2025
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.832.655,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	38.177.900,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.154.300,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.501.500,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.975.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.654.200,00
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0
Pengadaan Mebel	22.054.200,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.600.000,00
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kantor dan Bangunan Lainnya	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	257.292.215,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.348.135,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	219.944.080,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.022.500,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.986.500,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.330.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.706.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-
Jumlah 1	5.066.026.270,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	248.588.655,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	73.400.000,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	73.400.000,00
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	11.445.300,00
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	11.445.300,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	163.743.355,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	163.743.355,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	93.267.400,00

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN Berdasarkan Nota Kesepakatan PPAS 2025
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa)	40.040.900,00
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	30.230.300,00
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	9.810.600,00
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	53.226.500,00
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	11.445.300,00
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	9.445.300,00
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	11.445.300,00
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	11.445.300,00
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	9.445.300,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	19.930.300,00
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	19.930.300,00
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atauKepolisian Negara Republik Indonesia	19.930.300,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	111.238.468,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	111.238.468,00
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	n/a
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	55.565.068,00
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	18.173.400,00
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	37.500.000,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	38.095.300,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	38.095.300,00
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.500.000,00
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	31.595.300,00
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	-
Jumlah 2	520.222.000
Jumlah Total	5.577.146.393,00

Program dan Kegiatan Kecamatan Pameungpeuk yang direncanakan melalui Renja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2025 yang berisi program dan kegiatan yang diarahkan pada pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Pameungpeuk. Penyajian program dan kegiatan disajikan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggara pemerintah yang menjadi kewenangan Kecamatan. Rencana Kerja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2025 berupa program kerja dan kegiatan pembangunan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN PAMEUNGPEUK TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KECAMATAN PAMEUNGPEUK
KABUPATEN BANDUNG

KODE	URUSAN /BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026						
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
7.01.0.00.0.00.09.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
7	1	7.01.0.00.0.00.09.00	1	0	0	KECAMATAN								
7	1	7.01.0.00.0.00.09.00	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Kec.Pameungpeuk	76,50	5.066.026.270,00	APBD		77	4.625.595.123,00
7	1	7.01.0.00.0.00.09.00	1	2,0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Tertatanya administrasi pelapor dan keuangan	Kec.Pameungpeuk	100%	35.009.200,00	APBD		100%	25.800.000,00
7	1	7.01.0.00.0.00.09.00	1	2,0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.Pameungpeuk	1 Dokumen	4.048.200,00	APBD		1 Dokumen	4.240.000,00
7	1	7.01.0.00.0.00.09.00	1	2,0	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec.Pameungpeuk	2 Dokumen	5.005.000,00	APBD		2 Dokumen	5.100.000,00
7	1	7.01.0.00.0.00.09.00	1	2,0	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec.Pameungpeuk	2 Dokumen	6.535.000,00	APBD		2 Dokumen	5.100.000,00
7	1	7.01.0.00.0.00.09.00	1	2,0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Pameungpeuk	8 Laporan	15.821.000,00	APBD		8 Laporan	11.360.000,00
7	1	7.01.0.00.0.00.09.00	1	2,0	8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kec.Pameungpeuk	1 Dokumen	1.800.000,00	APBD		1 Dokumen	100.000,00
7	1	7.01.0.00.0.00.09.00	1	2,0	9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kec.Pameungpeuk	1 Dokumen	1.800.000,00	APBD		1 Dokumen	100.000,00
7	1	7.01.0.00.0.00.09.00	1	2,0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Tertatanya administrasi pelapor dan keuangan	Kec.Pameungpeuk	100%	4.488.030.100,00	APBD		100%	4.206.610.188,00

Perubahan Renja Pameungpeuk Tahun 2025

7	1	7.01.0.00.0.00. 09.00	1	2,0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Pameungpeuk	19 Orang/bulan	4.484.045.900,00	APBD		19 Orang/bulan	4.202.610.188,00
7	1	7.01.0.00.0.00. 09.00	1	2,0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec.Pameungpeuk	1 Laporan	3.984.200,00	APBD		1 Laporan	4.000.000,00
7	1		1	2,0 3	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Dokumen Administasi BMD sesuai ketentuan	Kec.Pameungpeuk	100%	-	APBD		100%	-
7	1		1	2,0 3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec.Pameungpeuk	Laporan		APBD		Laporan	
7	1	7.01.0.00.0.00. 02.00	1	2,0 4	0	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian PAD	Kec.Pameungpeuk		-	APBD			-
7	1	7.01.0.00.0.00. 02.00	1	2,0 4	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Pendapatan Retribusi Daerah	Kec.Pameungpeuk	Dokumen		APBD		Dokumen	-
7	1	7.01.0.00.0.00. 09.00	1	2,0 5	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan Disiplin penunjang aparatur	Kec.Pameungpeuk	100%	30.377.800,00	APBD		100%	12.000.000,00
7	1	7.01.0.00.0.00. 09.00	1	2,0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec.Pameungpeuk	20 Paket	9.194.000,00	APBD		20 Paket	6.000.000,00
7	1	7.01.0.00.0.00. 09.00	1	2,0 5	1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec.Pameungpeuk	Orang	2.420.300,00	APBD		Orang	-
7	1	7.01.0.00.0.00. 09.00	1	2,0 5	1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec.Pameungpeuk	50 Orang	18.763.500,00	APBD		50 Orang	6.000.000,00
7	1	7.01.0.00.0.00. 09.00	1	2,0 6	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal	Kec.Pameungpeuk	100%	137.640.255,00	APBD		100%	118.904.000,00
7	1	7.01.0.00.0.00. 09.00	1	2,0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec.Pameungpeuk	12 paket	5.998.900,00	APBD		12 paket	6.000.000,00
7	1	7.01.0.00.0.00. 09.00	1	2,0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec.Pameungpeuk	12 paket	46.832.655,00	APBD		12 paket	41.583.000,00
7	1	7.01.0.00.0.00. 09.00	1	2,0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec.Pameungpeuk	12 paket	38.177.900,00	APBD		12 paket	10.000.000,00
7	1	7.01.0.00.0.00. 09.00	1	2,0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec.Pameungpeuk	12 paket	9.154.300,00	APBD		12 paket	6.431.000,00

7	1	7.01.0.00.0.00.09.00	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec.Pameungpeuk	12 paket	10.000.000,00	APBD		12 paket	10.000.000,00
7	1	7.01.0.00.0.00.09.00	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kec.Pameungpeuk	12 paket	5.501.500,00	APBD		12 paket	6.500.000,00
7	1	7.01.0.00.0.00.09.00	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec.Pameungpeuk	12 Laporan	12.000.000,00	APBD		12 Laporan	12.000.000,00
7	1	7.01.0.00.0.00.09.00	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Pameungpeuk	12 Laporan	9.975.000,00	APBD		12 Laporan	26.390.000,00
7	1	7.01.0.00.0.00.09.00	1	2.07	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal	Kec.Pameungpeuk	100%	24.654.200,00	APBD		100%	500.000,00
7	1	7.01.0.00.0.00.09.00	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kec.Pameungpeuk	1 Unit	0	APBD		1 Unit	100.000,00
7	1	7.01.0.00.0.00.02.00	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec.Pameungpeuk	1 Unit	22.054.200,00	APBD		1 Unit	100.000,00
7	1	7.01.0.00.0.00.02.00	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec.Pameungpeuk	1 Unit	2.600.000,00	APBD		1 Unit	100.000,00
7	1	7.01.0.00.0.00.02.00	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec.Pameungpeuk	1 unit	0	APBD		1 unit	100.000,00
7	1	7.01.0.00.0.00.02.00	1	2.07	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec.Pameungpeuk	unit	-	APBD		1 unit	100.000,00
7	1	7.01.0.00.0.00.09.00	1	2.08	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal	Kec.Pameungpeuk	100%	257.292.215,00	APBD		100%	199.280.935,00
7	1	7.01.0.00.0.00.09.00	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec.Pameungpeuk	12 Laporan	2.000.000,00	APBD		12 Laporan	2.000.000,00
7	1	7.01.0.00.0.00.09.00	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec.Pameungpeuk	12 Laporan	35.348.135,00	APBD		12 Laporan	35.000.000,00
7	1	7.01.0.00.0.00.09.00	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec.Pameungpeuk	12 Laporan	219.944.080,00	APBD		12 Laporan	162.280.935,00
7	1	7.01.0.00.0.00.09.00	1	2.09	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal	Kec.Pameungpeuk	100%	93.022.500,00	APBD		100%	62.500.000,00

7	1	7.01.0.00.0.00.09.00	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec.Pameungpeuk	Unit	-	APBD	Unit	-
7	1	7.01.0.00.0.00.09.00	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec.Pameungpeuk	5 Unit	63.986.500,00	APBD	5 Unit	40.000.000,00
7	1	7.01.0.00.0.00.09.00	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec.Pameungpeuk	3 Unit	8.330.000,00	APBD	3 Unit	8.500.000,00
7	1	7.01.0.00.0.00.09.00	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec.Pameungpeuk	1 Unit	20.706.000,00	APBD	1 Unit	9.000.000,00
7	1	7.01.0.00.0.00.09.00	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec.Pameungpeuk	Unit	-	APBD	1 Unit	5.000.000,00
Jumlah 1										5.066.026.270,00			4.625.595.123,00
7	1	7.01.0.00.0.00.09.00	2	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Kec.Pameungpeuk	87,50 Point	248.588.655,00	APBD	88 Point	136.700.000,00
7	1		2	2.02	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan	Kec.Pameungpeuk	100%	73.400.000,00	APBD	100%	11.700.000,00
7	1		2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Pameungpeuk	12 Laporan	73.400.000,00	APBD	12 Laporan	11.700.000,00
7	1	7.01.0.00.0.00.31.00	2	2.03	0	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Capaian Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec.Pameungpeuk	100%	11.445.300,00	APBD	100%	25.000.000,00
7	1	7.01.0.00.0.00.31.00	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec.Pameungpeuk	12 Dokumen	11.445.300,00	APBD	12 Dokumen	25.000.000,00
7	1	7.01.0.00.0.00.09.00	2	2.04	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec.Pameungpeuk	100%	163.743.355,00	APBD	100%	100.000.000,00

7	1	7.01.0.00.0.00. 09.00	2	2,0 4	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec.Pameungpeuk	5 Laporan	163.743.355,00	APBD		5 Laporan	100.000.000,00
7	1	7.01.0.00.0.00. 20.00	3	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Kec.Pameungpeuk	87,50 Point	93.267.400,00	APBD		88 Point	38.000.000,00
7	1	7.01.0.00.0.00. 20.00	3	2,0 3	2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa)	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec.Pameungpeuk	100%	40.040.900,00	APBD		100%	6.500.000,00
7	1	7.01.0.00.0.00. 20.00	3	2,0 3	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kec.Pameungpeuk		30.230.300,00	APBD			-
7	1	7.01.0.00.0.00. 20.00	3	2,0 3	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec.Pameungpeuk	1 Laporan	9.810.600,00	APBD		1 Laporan	6.500.000,00
7	1	7.01.0.00.0.00. 20.00	3	2,0 3	6	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Keluarga yang terfasilitasi	Kec.Pameungpeuk	100%	53.226.500,00	APBD		100%	31.500.000,00
7	1	7.01.0.00.0.00. 20.00	2	6	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kec.Pameungpeuk	50 Keluarga	11.445.300,00	APBD		50 Keluarga	6.500.000,00
7	1	7.01.0.00.0.00. 20.00	2	6	7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kec.Pameungpeuk	50 Keluarga	9.445.300,00	APBD		50 Keluarga	6.000.000,00
7	1	7.01.0.00.0.00. 20.00	2	6	8	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kec.Pameungpeuk	50 Keluarga	11.445.300,00	APBD		50 Keluarga	6.000.000,00
7	1	7.01.0.00.0.00. 20.00	2	6	1 0	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kec.Pameungpeuk	50 Keluarga	11.445.300,00	APBD		50 Keluarga	6.500.000,00
7	1	7.01.0.00.0.00. 20.00	2	6	1 1	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kec.Pameungpeuk	50 Keluarga	11.445.300,00	APBD		50 Keluarga	6.500.000,00
7	1	7.01.0.00.0.00. 09.00	4	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Kec.Pameungpeuk	87,50 Point	19.930.300,00	APBD		88 Point	12.094.000,00
7	1	7.01.0.00.0.00. 09.00	4	2,0 2	0	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec.Pameungpeuk	100%	19.930.300,00	APBD		100%	6.047.000,00

Perubahan Renja Pameungpeuk Tahun 2025

7	1	7.01.0.00.0.00.09.00	4	2,0 2	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec.Pameungpeuk	1 Laporan	19.930.300,00	APBD		1 Laporan	6.047.000,00
7	1	7.01.0.00.0.00.09.00	5	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Kec.Pameungpeuk	100%	111.238.458,00	APBD		100%	62.679.000,00
7	1	7.01.0.00.0.00.09.00	5	2,0 1	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	Kec.Pameungpeuk	100%	111.238.458,00	APBD		100%	62.679.000,00
7	1	7.01.0.00.0.00.09.00	5	2,0 1	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec.Pameungpeuk	Orang	-	APBD		Orang	-
7	1	7.01.0.00.0.00.09.01	5	2,0 1	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec.Pameungpeuk	300 Orang	55.565.068,00	APBD		300 Orang	42.679.000,00
7	1	7.01.0.00.0.00.09.00	5	2,0 1	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec.Pameungpeuk	50 Orang	18.173.400,00	APBD		50 Orang	8.300.000,00
7	1	7.01.0.00.0.00.09.01	5	2,0 1	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec.Pameungpeuk	12 Dokumen	37.500.000,00	APBD		12 Dokumen	11.700.000,00
7	1	7.01.0.00.0.00.09.00	6	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Kec.Pameungpeuk	100%	38.095.300,00	APBD		100%	53.500.000,00
7	1	7.01.0.00.0.00.09.00	6	2,0 1	0	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Pameungpeuk	100%	38.095.300,00	APBD		100%	53.500.000,00
7	1	7.01.0.00.0.00.02.00	6	2,0 1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec.Pameungpeuk	Dokumen	-	APBD		Dokumen	-
7	1	7.01.0.00.0.00.02.00	6	2,0 1	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec.Pameungpeuk	6 Dokumen	6.500.000,00	APBD		6 Dokumen	6.000.000,00

Perubahan Renja Pameungpeuk Tahun 2025

7	1	7.01.0.00.0.00. 02.00	6	2.0 1	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec.Pameungpeuk	6 Dokumen	0	APBD		6 Dokumen	6.500.000,00	
7	1	7.01.0.00.0.00. 09.00	6	2.0 1	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec.Pameungpeuk	1 Dokumen	31.595.300,00	APBD		1 Dokumen	41.000.000,00	
7	1	7.01.0.00.0.00. 09.00	6	2.0 1	1 2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang mendapatkan pembinaan	Kec.Pameungpeuk	3 Laporan	-			Laporan	-	
Jumlah 2											520.222.000			302.973.000,00	
Jumlah Total											5.577.146.393,00				4.928.568.123,00

Pameungpeuk, Juni 2025
Camat Pameungpeuk

AGUS HINDAR RUSWANTO, S.STP.,M.Si
NIP. 197908172000031002

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KEGIATAN**

Program merupakan penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk/upaya yang berisi kegiatan dengan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

Program dan Kegiatan Kecamatan Pameungpeuk yang direncanakan melalui Renja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2025 dan telah mengalami perubahan berdasarkan hasil Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tahun 2025 yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung yang berisi program dan kegiatan yang diarahkan pada pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Pameungpeuk. Penyajian program dan kegiatan disajikan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggara pemerintah yang menjadi kewenangan Kecamatan. Rencana Kerja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2025 berupa program kerja dan kegiatan pembangunan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PAMEUNGPEUK TAHUN 2025

NO	SASARAN	KODE						Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Sumber Dana
									Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	
1	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik	7	1	7.01.0.00.0.00.0 9.00	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Kecamatan Pameungpeuk	76,50 Point	5.066.026.270,00	APBD
		7	1	7.01.0.00.0.00.0 9.00	1	2,01	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Tertatunya administrasi pelapor dan keuangan	Kecamatan Pameungpeuk	100%	35.009.200,00	APBD
		7	1		1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pameungpeuk	1 Dokumen	4.048.200,00	APBD
		7	1		1	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Pameungpeuk	2 Dokumen	5.005.000,00	APBD
		7	1		1	2,01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Pameungpeuk	2 Dokumen	6.535.000,00	APBD
		7	1	7.01.0.00.0.00.0 9.00	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Pameungpeuk	8 Laporan	15.821.000,00	APBD
		7	1	7.01.0.00.0.00.0 9.00	1	2,01	8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Pameungpeuk	1 Dokumen	1.800.000,00	APBD
		7	1	7.01.0.00.0.00.0 9.00	1	2,01	9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kecamatan Pameungpeuk	1 Dokumen	1.800.000,00	APBD
		7	1	7.01.0.00.0.00.0 9.00	1	2,02	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Tertatunya administrasi pelapor dan keuangan	Kecamatan Pameungpeuk	100%	4.488.030.100,00	APBD
		7	1	7.01.0.00.0.00.0 9.00	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Pameungpeuk	19 Orang/bulan	4.484.045.900,00	APBD
		7	1	7.01.0.00.0.00.0 9.00	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Pameungpeuk	1 Laporan	3.984.200,00	APBD
		7	1		1	2,03	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Dokumen Administasi BMD sesuai ketentuan	Kecamatan Pameungpeuk	100%	-	APBD

Perubahan Renja Pameungpeuk Tahun 2025

		7	1		1	2,03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Pameungpeuk	Laporan		
		7	1	7.01.0.00.0.00.0 9.00	1	2,05	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan Disiplin penunjang aparatur	Kecamatan Pameungpeuk	100%	30.377.800,00	
		7	1	7.01.0.00.0.00.0 9.00	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Pameungpeuk	20 Paket	9.194.000,00	APBD
		7	1	7.01.0.00.0.00.0 9.00	1	2,05	1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Pameungpeuk	Orang	2.420.300,00	
		7	1	7.01.0.00.0.00.0 9.00	1	2,05	1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Pameungpeuk	50 Orang	18.763.500,00	APBD
		7	1	7.01.0.00.0.00.0 9.00	1	2,06	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal	Kecamatan Pameungpeuk	100%	137.640.255,00	APBD
		7	1	7.01.0.00.0.00.0 9.00	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pameungpeuk	12 paket	5.998.900,00	APBD
		7	1	7.01.0.00.0.00.0 9.00	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pameungpeuk	12 paket	46.832.655,00	APBD
		7	1	7.01.0.00.0.00.0 9.00	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Pameungpeuk	12 paket	38.177.900,00	APBD
		7	1	7.01.0.00.0.00.0 9.00	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pameungpeuk	12 paket	9.154.300,00	APBD
		7	1	7.01.0.00.0.00.0 9.00	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Pameungpeuk	12 paket	10.000.000,00	APBD
		7	1	7.01.0.00.0.00.0 9.00	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kecamatan Pameungpeuk	12 paket	5.501.500,00	APBD
		7	1	7.01.0.00.0.00.0 9.00	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Pameungpeuk	12 Laporan	12.000.000,00	APBD
		7	1	7.01.0.00.0.00.0 9.00	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Pameungpeuk	12 Laporan	9.975.000,00	APBD
	Persentase BMD dalam keadaan baik	7	1	7.01.0.00.0.00.0 9.00	1	2,07	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal	Kecamatan Pameungpeuk	100%	24.654.200,00	APBD
		7	1	7.01.0.00.0.00.0 9.00	1	2,07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kecamatan Pameungpeuk	1 Unit	0	
		7	1	7.01.0.00.0.00.0 2.00	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan Pameungpeuk	1 Unit	22.054.200,00	APBD
		7	1	7.01.0.00.0.00.0 2.00	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan danMesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Pameungpeuk	1 Unit	2.600.000,00	APBD

		7	1	7.01.0.00.0.00.0 2.00	1	2,07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Pameungpeuk	1 unit	0	APBD
		7	1	7.01.0.00.0.00.0 2.00	1	2,07	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Pameungpeuk	unit	0	APBD
	Nilai Sakip	7	1	7.01.0.00.0.00.0 9.00	1	2,08	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal	Kecamatan Pameungpeuk	100%	257.292.215,00	APBD
		7	1	7.01.0.00.0.00.0 9.00	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Pameungpeuk	12 Laporan	2.000.000,00	APBD
		7	1	7.01.0.00.0.00.0 9.00	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Pameungpeuk	12 Laporan	35.348.135,00	APBD
		7	1	7.01.0.00.0.00.0 9.00	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pameungpeuk	12 Laporan	219.944.080,00	APBD
	Persentase BMD dalam keadaan baik	7	1	7.01.0.00.0.00.0 9.00	1	2,09	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal	Kecamatan Pameungpeuk	100%	93.022.500,00	APBD
		7	1	7.01.0.00.0.00.0 9.00	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Pameungpeuk	Unit	-	APBD
		7	1	7.01.0.00.0.00.0 9.00	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Pameungpeuk	5 Unit	63.986.500,00	APBD
		7	1	7.01.0.00.0.00.0 9.00	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Pameungpeuk	3 Unit	8.330.000,00	APBD
		7	1	7.01.0.00.0.00.0 9.00	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	20.706.000,00	APBD
		7	1	7.01.0.00.0.00.0 9.00	1	2,09	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	-	APBD
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	7	1	7.01.0.00.0.00.0 9.00	2	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Kecamatan Pameungpeuk	87,50 Point	284.588.655,00	APBD
		7	1		2	2,02	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Pameungpeuk	100%	73.400.000,00	APBD

		7	1		2	2,02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pameungpeuk	12 Laporan	73.400.000,00	APBD
		7	1	7.01.0.00.0.00.3 1.00	2	2,03	0	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Capaian Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan Pameungpeuk	100%	11.445.300,00	APBD
		7	1	7.01.0.00.0.00.3 1.00	2	2,03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan Pameungpeuk	12 Dokumen	11.445.300,00	APBD
		7	1	7.01.0.00.0.00.0 9.00	2	2,04	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Pameungpeuk	100%	163.743.355,00	APBD
		7	1	7.01.0.00.0.00.0 9.00	2	2,04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Pameungpeuk	5 Laporan	163.743.355,00	APBD
		7	1	7.01.0.00.0.00.2 0.00	3	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Kecamatan Pameungpeuk	87,50 Point	93.267.400	
		7	1	7.01.0.00.0.00.2 0.00	3	2,01	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Pameungpeuk	100%	-	APBD
		7	1	7.01.0.00.0.00.2 0.00	3	2,01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pameungpeuk	Laporan	-	APBD
		7	1	7.01.0.00.0.00.2 0.00	3	2,03	2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang TidakMemiliki Desa)	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pameungpeuk	100%	40.040.900,00	APBD
		7	1	7.01.0.00.0.00.2 0.00	3	2,03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kecamatan Pameungpeuk		30.230.300,00	APBD
		7	1	7.01.0.00.0.00.2 0.00	3	2,03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Pameungpeuk	1 Laporan	9.810.600,00	
		7	1	7.01.0.00.0.00.2 0.00	3	2,03	6	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Keluarga yang terfasilitasi	Kecamatan Pameungpeuk	100%	53.226.500,00	APBD
		7	1	7.01.0.00.0.00.2 0.00	2	6	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Pameungpeuk	50 Keluarga	11.445.300,00	APBD
		7	1	7.01.0.00.0.00.2 0.00	2	6	7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Pameungpeuk	50 Keluarga	9.445.300,00	APBD

		7	1	7.01.0.00.0.00.2 0.00	2	6	8	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kecamatan Pameungpeuk	50 Keluarga	11.445.300,00	APBD
		7	1	7.01.0.00.0.00.2 0.00	2	6	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kecamatan Pameungpeuk	50 Keluarga	11.445.300,00	APBD
		7	1	7.01.0.00.0.00.2 0.00	2	6	11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kecamatan Pameungpeuk	50 Keluarga	9.445.300,00	APBD
	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap petundang-undangan	7	1	7.01.0.00.0.00.0 9.00	4	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Kecamatan Pameungpeuk	87,50 Point	19.930.300,00	APBD
		7	1	7.01.0.00.0.00.0 9.00	4	2,01	0	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pameungpeuk	100%	0	APBD
		7	1	7.01.0.00.0.00.0 9.00	4	2,01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pameungpeuk	Laporan	-	APBD
		7	1	7.01.0.00.0.00.0 9.00	4	2,01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Pameungpeuk	1 Laporan	0	APBD
		7	1	7.01.0.00.0.00.0 9.00	4	2,02	0	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Pameungpeuk	100%	19.930.300,00	APBD
		7	1	7.01.0.00.0.00.0 9.00	4	2,02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Pameungpeuk	1 Laporan	19.930.300,00	APBD
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	7	1	7.01.0.00.0.00.0 9.00	5	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Kecamatan Pameungpeuk	100%	111.238.468,00	APBD
		7	1	7.01.0.00.0.00.0 9.00	5	2,01	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	Kecamatan Pameungpeuk	100%	111.238.468,00	
		7	1	7.01.0.00.0.00.0 9.01	5	2,01	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Pameungpeuk	300 Orang	55.565.068,00	APBD

		7	1	7.01.0.00.0.00.0 9.00	5	2,01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Pameungpeuk	50 Orang	18.173.400,00	APBD
		7	1	7.01.0.00.0.00.0 9.01	5	2,01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Pameungpeuk	12 Dokumen	37.500.000,00	APBD
4	Meningkatnya pengelolaan pemerintahan desa	7	1	7.01.0.00.0.00.0 9.00	6	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Kecamatan Pameungpeuk	100%	38.095.300,00	
		7	1	7.01.0.00.0.00.0 9.00	6	2,01	0	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Pameungpeuk	100%	38.095.300,00	APBD
		7	1	7.01.0.00.0.00.0 2.00	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Pameungpeuk	Dokumen	-	
		7	1	7.01.0.00.0.00.0 2.00	6	2,01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Pameungpeuk	6 Dokumen	6.500.000,00	APBD
		7	1	7.01.0.00.0.00.0 2.00	6	2,01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Pameungpeuk	6 Dokumen	0	APBD
		7	1	7.01.0.00.0.00.0 9.00	6	2,01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		1 Dokumen	31.595.300,00	APBD
		7	1	7.01.0.00.0.00.0 9.00	6	2,01	1 2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang mendapatkan pembinaan		3 Laporan	-	APBD
												5.577.146.393,00	

Pameungpeuk, Juni 2025

CAMAT PAMEUNGPEUK


AGUS HINDAR RUSWANTO.S.STP..M.Si

NIP. 197908172000031002

BAB V

PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2025 disusun berdasarkan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tahun 2025 yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung selain itu berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2021-2026, dimana Renstra Kecamatan Pameungpeuk tersebut merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026. Adapun RPJMD Kabupaten Bandung tersebut disusun melalui kajian dan penelaahan terhadap RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Barat, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Kecamatan Pameungpeuk bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, seperti RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2026 serta RKPD Kabupaten Bandung 2025.

wujud dari tindak lanjut Rencana Strategis Kecamatan Pameungpeuk yang memuat program dan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Bandung tahun 2021 – 2026. Renja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2025 telah mengalami pemutakhiran dari Permendagri 13/2006 menjadi Permendagri 90/2019 sehingga terdapat perubahan pada anggaran, program dan kegiatan.

Renja Kecamatan Pameungpeuk tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Pameungpeuk tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran

pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Renja Kecamatan Pameungpeuk disusun berdasarkan pada program dan kegiatan sesuai dengan permasalahan dan analisis kebutuhan serta pagu anggaran yang ada. Selain itu Renja Kecamatan Pameungpeuk dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Rencana Kerja Kecamatan Pameungpeuk 2025 dijadikan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 dan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Pameungpeuk. Renja Kecamatan Pameungpeuk 2025 juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Pameungpeuk sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa mendatang.

CAMAT PAMEUNGPEUK

ttd

AGUS HINDAR RUSWANTO

BUPATI BANDUNG

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA